

Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo

Ahmad Fauzi R (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: ahmad.fauzi11@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the role of local government in suppressing the number of school dropouts in Wajo and describe the factors that cause dropouts in Wajo. Head and Apparatus Wajo District Education Office, Unit of the Department of Education, elementary school, junior and senior high schools in the three districts, as well as the Community. The results showed that the efforts or the government's role dae-rah in suppressing the number of school dropouts in Wajo such a policy in the field of education, funding for education, the provision of scholarships for the poor, programs help poor students (BSM), as well as the dissemination to the public, based on the case found the author in the field, the factors that cause children out of school is lack of interest of children to schools, the circumstances are not harmonious family, the family's economic weakness, the child's environment, people's views on education.

Keywords: local government, school dropouts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo dan menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Kepala dan Aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di tiga Kecamatan, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat. berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan.

Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuantujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan

cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah

mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula.

Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah.

Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15).

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam pendidikan di bangku sekolah. Data Dinas Pendidikan menunjukkan masih adanya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di kabupaten wajo setiap tahunnya menjadi ironi bagi pemerintah daerah, dimana kondisi anak putus sekolah pada tahun 2014 mencapai angka 703 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Pemerintah Kabupaten Wajo bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengeyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wajo. Olehnya itu, bertolak dari latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Adapun informan penelitian ini Wakil Bupati Wajo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Daerah dalam menekan Angka Anak Putus

Sekolah di Kabupaten Wajo Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Wajo dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah dalam rangka menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Wajo tahun 2014 mencapai angka 703 anak.

“Hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang pada tahun 2013 saja mencapai angka kurang lebih seribu anak, inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan”, jelas Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si saat diwa-

wancarai di ruangnya Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Wajo di bidang pendidikan tentunya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Wajo yakni meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu terhadap layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan, utamanya SD, SLTP dan SLTA seiring dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Bupati Wajo, yang telah diberikan kepada setiap perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa, untuk kemudian disosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak setiap masyarakat akan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Wajo telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo. Salah satu indikator paling penting guna peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo yakni penganggaran untuk membantu proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan, dan diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam meng-

hadapi masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada.

Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) yang cukup besar ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yakni mencapai angka 36 Miliar lebih atau meningkat Rp.10 Miliar dibanding tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si, mengatakan: "Besarnya alokasi anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo, dimana hal tersebut telah menjadi Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Wajo dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, yakni hak atas layanan dan peningkatan pendidikan". (wawancara Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47)

Anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Wajo ini jumlahnya terbilang sangat besar. Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo menyebutkan anggaran dana bos untuk kabupaten wajo sebesar Rp 36.938.970.000. Dana tersebut dialokasikan kepada siswa Sekolah Dasar yang berjumlah 41.635 siswa sedangkan Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 12.177 siswa, dengan rincian persisiwanya sebesar Rp. 800.000 untuk SD, dan untuk SMP sebesar Rp. 1.000.000 persiswa pertahunnya. Namun untuk tahun 2014, pemerintah daerah yang telah menjadikan program wajib belajar 12 tahun bagi Kabupaten Wajo dengan meng-anggarkan untuk SMA sebesar Rp. 1.500.000 untuk setiap siswa pertahunnya.

Sementara penganggaran dana pendidikan Gratis demi mendukung peningkatan mutu pendidikan, pemerintah Kabupaten Wajo

harus mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Wajo rata-rata sebesar Rp. 23 Miliar setiap tahunnya. Sementara untuk tahun 2013 dan seterusnya Pemkab juga akan menggratiskan hingga ke tingkat SMA/Sederajat dengan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 10 M. Selain dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah daerah juga memberikan bantuan bagi siswa miskin di setiap sekolah dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Dengan adanya bantuan-bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi masalah biaya pendidikan yang menurut mereka mahal.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bersumber dari APBD yang ditransfer ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kesekolah. Adapun mekanisme penyaluran dana BOS bersifat fluktuasi. Artinya, kadang mengalami kenaikan, bahkan bisa mengalami penurunan.

Diantara faktor-faktor penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, kiranya faktor ekonomi terkadang menjadi faktor yang paling sering ditemui. Permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, maka optimalisasi pemberian beasiswa menjadi alternatif kebijakannya. Dikatakan optimalisasi, karena secara faktual pemerintah sudah menggelontorkan kebijakan pemberian beasiswa. Permasalahannya adalah belum meratanya, mekanisme, dan sistem pemberian dana. Oleh karenanya, perlu ada upaya pembenaan sistem pemberian beasiswa. Siapa, bagaimana caranya, dan untuk apa pemanfaatannya adalah beberapa hal yang mesti direvitalisasi. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si, yang mengatakan:

"Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Sekolah terkait telah mengoptimalkan dari segi pendataan siswa

yang seharusnya dan selayaknya mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk meringankan beban orang tua dan sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pendidikan".(wawancara Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47)

Program BSM (Bantuan Siswa Miskin) Program BSM merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di setiap daerah dengan maksud untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Wajo pada khususnya terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global. Program ini bertujuan : Untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak; Mencegah siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya; Membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran; kegiatan Mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas); serta Membantu kelancaran program sekolah. Siswa Penerima BSM ini berasal dari keluarga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang memiliki anak usia sekolah. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut: BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun; BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun; BSM

SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

Selain mengeluarkan kebijakan dan program di bidang pendidikan pemerintah daerah juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi.

Kondisi anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat diatasi melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan yaitu, pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar belakang pendidikan tetapi dapat hidup layak.

Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah melakukan kampanye pendidikan yang telah bekerja sama dengan perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan/Desa berupa sosialisasi dan penyediaan taman baca di setiap kelurahan/desa dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan terkhusus bagi setiap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kebijakan kebijakan strategis terutama di bidang pemerataan dan perluasan akses, misalnya subsidi pendidikan gratis, penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program wajib belajar 12 tahun. Melalui so-

sialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya. Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo diatas, dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo, menurut penulis kebijakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Pemkab Wajo dengan berbagai program pendukungnya yang belum terealisasi secara optimal, hal ini terjadi karena masih adanya kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Wajo. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini Kecamatan maupun Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor utama dalam mensosialisasikan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pentingnya pendidikan bagi setiap anak untuk peningkatan kulaitas masyarakat yang belum merata, terlihat dari masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

Selain itu, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan bantuan siswa miskin (BSM) harus dilakukan pendataan yang obyektif bagi setiap masyrakat yang seharusnya menerima dan merata bagi setiap masyarakat. Jadi menurut penulis Pemkab Wajo yakni Dinas Pendidikan dan setiap elemen terkait agar melakukan pendataan yang obyektif serta merata bagi masyarakat miskin yang memang pantas untuk menerima bantuan tersebut demi mengurangi beban orang tua untuk menjamin hak dasar setiap anak untuk bersekolah dan hak masyarakat akan pendidikan.

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi pemerintah daerah. Menurut Wakil Bupati Wajo Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE, M.Si, bahwa: "Bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam

rangka peningkatan mutu dan kualitas masyarakat di bidang pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tentunya sebagai daya saing masyarakat di era sekarang ini". (wawancara Selasa 24 Februari 2015, pukul 10:32)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. "Tahun 2014, data anak putus sekolah mencapai angka 703 anak, hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang pada tahun 2013 saja mencapai angka kurang lebih seribu anak, inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan", jelas Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si saat di wawancara di ruangannya Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47.

Berikut ini data perbandingan anak putus sekolah dengan anak sekolah yang ada di Kabupaten Wajo:

Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo
Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	Jumlah	
			Anak Putus Sekolah	Anak Sekolah
1	SD	6-11 / 7-12	389	41.635
2	SMP	11-14 / 12-15	145	12.177
3	SMA	14-17 / 15-18	169	10.296
Jumlah			703	64.108

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Berdasarkan tabel diatas angka anak putus sekolah terjadi pada pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar 389 anak dan anak yang sekolah sebesar 41.635 anak. Kemudian

pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak putus sekolah mencapai angka 145 anak dan anak yang sekolah sebesar 12.177 anak. Dan anak putus sekolah pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) mencapai angka 169 anak, sedangkan anak sekolah sebesar 10.296 anak. Jumlah anak putus sekolah untuk tahun 2014 mencapai 703 anak. Hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ketahun. Anak putus sekolah terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Tabel 4.7

Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan
Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo
Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lakilaki	Perempuan	
1	SD	214	175	389
2	SMP	70	75	145
3	SMA	96	73	169
Total		380	323	703

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tingkat SD, kondisi anak putus sekolah mencapai angka 214 untuk anak laki-laki dan 175 untuk anak perempuan. Tingkat SMP menunjukkan kondisi anak putus sekolah mencapai angka 70 untuk anak laki-laki dan 75 untuk anak perempuan dan kondisi anak putus sekolah pada tingkat SMA anak laki-laki mencapai angka 96 dan anak perempuan mencapai angka 73. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Wajo didominasi oleh anak laki-laki, kecuali di tingkat SMP yang didominasi oleh anak perempuan Kasus anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah yang wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang

dari luar diri anak seperti lingkungan dan sebagainya. Berikut ini penulis akan memaparkan kasus mengenai kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo: Pertama, kasus yang terjadi di SDN 14 Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dalam hal ini Ibu Hj. Wati S.Pd selaku kepala sekolah SDN 14 Lapongkoda (Selasa 17 Februari 2015, Pukul 09:38 WITA). Penulis mengetahui bahwa bahwa terdapat seorang anak yang putus sekolah, yakni siswa kelas 5 atas nama Kadir Panrita disebabkan minat anak untuk bersekolah yang tiba-tiba hilang. Dari apa yang diketahui pihak sekolah, hal dikarenakan perceraian kedua orang tuanya yang berdampak pada psikologi sang anak dimana tingkah lakunya disekolah mulai berubah seperti tiba-tiba sering mengganggu temannya atau membuat onar disekolah serta malas untuk kesekolah dan akhirnya minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi. Kedua, kasus yang terjadi di Desa Piampo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tepatnya di SDN 201 Wewangrewu. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dalam hal ini Muh Yusuf S.pd selaku Kepala Sekolah (Rabu 19 Februari 2015, pukul 10.45), penulis mengetahui bahwa di SDN 201 Wewangrewu terdapat satu anak yang DO (Drop Out) atau putus sekolah di kelas IV (empat). Anak yang DO (Drop Out) pada kelas IV (empat) atas nama Ari Wardana dikarenakan minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi yang awalnya anak tersebut sering membolos sekolah yang kemudian anak tidak ingin lagi untuk bersekolah seperti selayaknya anak seusianya atau teman sebayahnya yang harusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Ketiga, kasus yang terjadi di Desa Salomenraleng Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tepatnya yang terjadi pada keluarga Bapak Muh. Nure dan Ibu Suarni yang memiliki 5 orang anak (3 laki-laki dan 2 perempuan) dimana anak pertama dan keduanya hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat

Sekolah Dasar, anak ketiganya tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar dan 2 anak perempuannya sementara mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar. Saat diwawancarai pada Rabu 18 Februari 2015/Pukul 10.25, Ibu Suarni menjelaskan bahwa anaknya yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan salah satu anaknya terpaksa berhenti sekolah dikarenakan lemahnya ekonomi keluarga, dimana suaminya yang hanya bekerja sebagai nelayan di Danau Tempe dengan penghasilan yang tidak tetap serta keadaan suaminya yang tidak sesehat dulu lagi untuk lebih sering turun menangkap ikan, sehingga tiga anak laki-lakinya lebih memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan mereka. Keempat, kasus yang terjadi di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini terdapat beberapa keluarga yang anaknya putus sekolah. Salah satunya terjadi pada Muhammad Akbar anak dari Bapak Ramli dan Ibu Nurmiati yang mengenyam pendidikan di SMPN 3 Sengkang, saat diwawancarai (Sabtu 21 Februari 2015, pukul 13:29) ibu Nurmiati menjelaskan hal ini dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya dimana anaknya sehari-harinya bergaul dengan beberapa anak yang memang tidak bersekolah serta tidak seumuran dengannya yang menyebabkan dia sering membolos sekolah serta terpengaruh dengan gaya hidup temannya yang merokok dan sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga lama-kelamaan berdampak pada keinginan anak untuk tidak bersekolah lagi. Kelima, kasus anak putus sekolah yang terjadi di Desa Waringpalennae ini terdapat beberapa keluarga yang memiliki anak putus sekolah. Salah satunya yang terjadi pada keluarga bapak Amir dan Ibu Hasnani yang memiliki 3 orang anak laki-laki, dimana anak pertama dan kedua hanya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, sedangkan anak

ketiganya yang sementara mengenyam pendidikan di kelas 7 SMPN SATAP 8

Waringpalennae terpaksa berhenti. Saat diwawancarai pada pukul 11.35 / Rabu, 25 Februari 2015, ibu Hasnani mengaku bahwa anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena dia kurang mempunyai dalam hal biaya. Walaupun pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan seperti dana BOS, beasiswa bagi keluarga miskin para orang tua mengeluh akan tingginya pembiayaan yang terkait dengan aspek biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka seperti biaya untuk kebutuhan pribadi anak yang bersekolah seperti baju seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan tambahan uang jajan pada saat anakanaknya bersekolah. Apalagi pekerjaan suaminya yang hanya sebagai buruh pengangkut semen dengan penghasilan Rp. 50.000,- per harinya dirasa pas-pasan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya dan ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan atau keperluan sekolah anak-anaknya. Selain itu setelah tamat dari sekolah, anakanaknya belum tentu bisa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau mendapatkan pekerjaan yang tetap ataupun lebih layak.

Maka dari itu anak-anaknya lebih memilih untuk bekerja sebagai kulih bangunan untuk menghasilkan uang dari pada melanjutkan sekolahnya. Hal ini tentunya dapat meringankan beban orang tuanya serta dapat menambah penghasilan dan mengatasi kesulitan biaya hidup keluarganya. Keenam, kasus yang terjadi di Desa Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Tepatnya di SMAN 1 Sabbangparu. Berdasarkan wawancara langsung dengan bagian kesiswaan, yakni ibu Andi Meriyani S.Pd (Kamis 26 Februari 2015, pukul 10:46) menjelaskan bahwa di SMAN 1 Sabbangparu terdapat beberapa anak putus sekolah pada kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas).

“Dari kasus pada kelas X (sepuluh) terdapat 9 anak yang berhenti sekolah. Beberapa

dikarenakan keinginan mereka sendiri, atau bisa dikatakan minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi dan sebagian anak lainnya yang berhenti bersekolah di SMAN 1 Sabbangparu disebabkan anak-anak lebih memilih bekerja menjadi buruh penggiling beras (ma'deros), karena dianggap mereka bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus membuang waktu dengan mengenyam pendidikan di bangku sekolah sedangkan kasus di kelas XI (sebelas) terdapat 2 anak yang berhenti sekolah karena keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang sementara masing mengenyam pendidikan seperti teman sebayahnya ataupun anak seusia mereka", jelas ibu Andi Meriyani S.Pd saat diwawancarai. Berdasarkan dari beberapa kasus anak putus sekolah di Kabupaten Wajo yang dilampirkan oleh penulis dengan mengambil example di tiga Kecamatan (Kec. Tempe, Kec. Tanasitolo, Kec. Sabbangparu), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi anak putus sekolah, yakni: Kurangnya minat anak untuk bersekolah Penyebab anak putus sekolah juga datang dari dirinya sendiri yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah. Hal ini terjadi pada kasus pertama yang dialami oleh M. Kadir Panrita siswa SDN 14 Lapongkoda. Hal ini juga dialami oleh Ari Wardana siswa kelas IV (empat) SDN 201 Wewangrewu. Kasus lainnya terdapat di SMAN 1 Sabbangparu, dari penjelasan bagian kesiswaan sekolah dimana beberapa anak yang berhenti bersekolah karena keinginan sendiri atau bisa dikatakan minat anak untuk bersekolah telah tidak ada lagi. Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama

tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang terpelajar sehingga yang mem- pengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya. Namun, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa kurangnya perhatian antar anggota keluarga dan terkadang berupa perselisihan keluarga yang berdampak pada perceraian orang tua, dimana hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah. Hal ini terjadi pada M. Kadir Panrita siswa SDN 14 Lapongkoda yang dikarenakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya sehingga minat anak untuk bersekolah berkurang, dimana pihak sekolah yang telah berupaya untuk menghubungi orang tua dalam hal ini ibu dari Kadir Panrita agar anaknya dapat kembali bersekolah seperti teman sebayahnya, namun tidak mendapat respon apapun dari ibu Kadir Panrita.

Lemahnya ekonomi keluarga Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar anak.

Berdasarkan kasus ketiga yang dialami oleh keluarga Bapak Muh. Nure dan Ibu Suarni yang terjadi karena lemahnya ekonomi keluarga mengakibatkan anak tidak dan atau putus sekolah. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari misalnya anak membantu orang tua untuk menangkap ikan di sungai atau danau, karena dianggap meringankan beban orang tua anak diajak ikut orang tua untuk bekerja dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama yang berdampak pada berhenti atau anak putus sekolah. Hal ini juga terjadi pada keluarga Bapak Amir dan Ibu Hasnani, dimana pekerjaan Bapak Amir yang hanya sebagai buruh pengangkut semen dengan penghasilan Rp. 50.000,- per harinya dirasa pas-pasan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya dan ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan atau keperluan sekolah anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja dikarenakan hal tersebut dianggap dapat meringankan beban orangtua.

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar / pendidikan. Oleh sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif. Suasana lingkungan sebenarnya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar bagi anak. Lingkungan yang tentram, nyaman, damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Seperti halnya dengan teman sepergaulan yang pastinya akan memberi dampak pada sang anak, baik itu bernilai positif ataupun negatif. Hal ini terjadi pada Muhammad Akbar (kasus

keempat) dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya dimana sehari-harinya bergaul dengan beberapa anak yang memang tidak bersekolah serta tidak seumuran dengannya yang menyebabkan dia sering membolos sekolah serta terpengaruh dengan gaya hidup temannya yang merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Bagaimanapun juga adanya pergaulan ini mempunyai pengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan cara bertindak dan lain sebagainya dari setiap individu. Dimana pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

Berdasarkan kasus yang terjadi di SMAN 1 Sabbangparu pada kelas XI (sebelas) terdapat 2 anak yang berhenti sekolah karena keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang sementara masing-masing mengenyam pendidikan seperti teman sebayahnya ataupun anak seusia mereka, yang banyak terjadi pada kaum hawa. Pernikahan dini yang terkadang berakibat pada terhentinya salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup warga sementara pada sebagian besar kasus anak dengan pernikahan dini terhenti pendidikannya. Namun membiarkan anak putus sekolah adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak seumuran mereka.

Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat sulit, merasa tidak mampu, mempengaruhi, buang waktu banyak, lebih baik bekerja sejak anak-anak ajakan membantu orang tua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis, juga ka-

rena anggapan mereka tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi pegawai negeri, hal ini tentu karena kurang memahami arti, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini terjadi pada kasus kelima yang dialami oleh keluarga Bapak Amir dan Ibu Hasnani yang pandangannya terhadap pendidikan mewakili masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang nantinya. Namun, tidak dipungkiri masih adanya sebagian kecil masyarakat menganggap pendidikan itu kurang penting. Alasannya adalah sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah atau miskin, karena ada yang orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup mewah karena mereka bekerja, sekolah hanyalah untuk orang yang berada. Budaya seperti ini juga nampaknya masih mengakar di masyarakat. Masih kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting.

Pendidikan mengakibatkan sebagian kecil masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Bapak H. Jasman Juanda bahwa: “di Kabupaten Wajo sendiri, perhatian dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bisa dikatakan masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah terkadang dikarenakan karena membantu orang tua bekerja atau berdagang. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan mutu pendidikan, tapi masyarakat belum mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan, sehingga banyak orang menyesal dikemudian hari”. (wawancara, Senin 2 Maret 2015, Pukul 12.47).

Padahal fungsi pendidikan nasional bukan demikian, hal ini sebagaimana tergambar dan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989, pasal 3: “pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia da-

lam rangka mewujudkan upaya tujuan nasional.”

Demikian juga tujuan pendidikan nasional bukan seperti anggapan masyarakat tradisional, yang mana tujuan pendidikan nasional sebagaimana juga yang termuat dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, pasal 4: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”

KESIMPULAN

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar. 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Wajo; Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin Program BSM (Bantuan Siswa Miskin); Sosialisasi kepada masyarakat

Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah, Kondisi obyektif (gambaran umum) mengenai studi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo di tahun 2014 mencapai angka 703 anak, yang kemudian terbagi di beberapa tingkatan pendidikan

sekolah, di tingkat SD jumlah anak putus sekolah berjumlah 389 anak, di tingkat SMP berjumlah 145 anak, dan di tingkat SMA berjumlah 169 anak.

Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah antara lain: Kurangnya minat anak untuk bersekolah; Keadaan keluarga yang tidak harmonis ; Lemahnya ekonomi keluarga; Kondisi lingkungan tempat tinggal anak; Pandangan masyarakat akan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Indar. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Damayanti, Whanty. 2006. Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mudyahardjo, Redja. 2012. Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. Sosiologi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Saleh, Hasrat Arief dkk. 2013. Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi.
- Sarundajang, S.H. 2011. Babak Baru Sistem Pemerintahan. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial". Refika Aditama: Bandung.
- Sumarjono, Selo. 1974. Sistem Sosial Indonesia. Rineka Cipta: Yogyakarta.
- Syafaruddin dan Anzizhan. 2004. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. Grasindo: Jakarta.
- Tim Prima Pena. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Gitamedia Pres: Jakarta.
- http://wajokab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi_2/publikasi/files/search/searchtext.xml
- <http://www.bimbingan.org/teoriansalisis-menurut-para-ahli.htm> UNDANG-UNDANG Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.